

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 126 ayat 2, bahwa penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju ;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024, dan Hasil Evaluasi Hasil Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan / atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup ;

3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk tahun 2026 dan perkiraan maju tahun 2027 ;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD 2026, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD.
5. Penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.
6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2026 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2029 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor ...);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
27. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2026 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- 1) Menyajikan capaian kinerja pelayanan tahun lalu sebagai dasar penyusunan rencana Tahun 2026.
- 2) Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan.

- 3) Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- 4) Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).
- 5) Menyusun perencanaan perencanaan yang mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi.
- 6) Digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2026 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan RENJA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026.

BAB II. Hasil Evaluasi RENJA DLH tahun lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya

BAB III. Tujuan dan Sasaran DLH

Berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap kebijakan Nasional dalam pembangunan bidang lingkungan hidup, tujuan & sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar serta daftar Program, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 2026.

BAB IV. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang program dan kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup yang disertai dengan prakiraan maju tahun 2027.

BAB V. Penutup

Berisi catatan penting, kaidah – kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun lalu (2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2025) dengan mengacu pada APBD tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2025 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan capaian Renja 2024, terdapat salah satu indikator yang tidak mencapai target, yaitu Indeks Kualitas Lahan. Hal tersebut dikarenakan ada perubahan metode dari perhitungan luasan RTH menjadi delineasi tutupan vegetasi, sehingga banyak RTH yang berbentuk lapangan dan sawah tidak bisa masuk dalam perhitungan IKL ini. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan yang dilakukan adalah dengan penanaman tanaman bertajuk lebar, agar bisa memenuhi nilai delineasi.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	65,32	67,78	67,78	56,11	82,78%	67,78	56,20	86,04%
		Indeks kualitas udara	87,40	85,83	86,43	89,79	103,89 %	87,38	89,80	102,75 %
		Indeks kualitas lahan	56,78	33,51	56,23	34,13	60,70%	56,73	34,15	60,14%
		Persentase capaian layanan persampahan	98,00	97,78	97,78	98,01	100,24 %	97,79%	98,10	100,10 %
	Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu	90,00	91,67	85	27,22	32,02%	91,67%	50,00%	30,24%
		Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)	100,00	100	100	100	100,00 %	100%	100,00%	100,00 %
		Persentase RTH yang terkelola	100,00	100	100	100	100,00 %	100%	100,00%	100,00 %
		Persentase sampah terkelola	98,00	97,78	97,78	98,01	100,24 %	98,00%	98,10%	100,01 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisa si Renja PD	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra
		Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik	80,00	73,81	75	75,01	100,01 %	75,00%	76,00%	93,76%
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia	100%	100	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.02.2.01	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	5 dokumen	1	1	2	200,00 %	1 dokumen	4	80,00%
2.11.02.2.01.006	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	5 dokumen	1	2	2	100,00 %	1 dokumen	4	80,00%
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase titik sampling badan air yang memenuhi baku mutu	58%	55	56	59	105,36 %	57%	57	98,28%
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2eq)	15,15%	8,79	8,95	8,95	100,00 %	11,69%	11,69	77,16%
		Persentase titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	100%	100	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.03.2.01	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	3 aksi	3	3	3	100,00 %	3 aksi	3	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Hidup Kabupaten/Kota	yang terlaksana								
		Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim	3 kali	3	3	3	100,00 %	3 kali	3	100,00 %
		Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu	18 titik	16	18	18	100,00 %	18 titik	18	100,00 %
2.11.03.2.01.001	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 dokumen	2	1	1	100,00 %	1 dokumen	4	100,00 %
2.11.03.2.01.002	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	4 dokumen	2	1	1	100,00 %	1 dokumen	4	100,00 %
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan RTH publik terhadap luas wilayah kota	16,28%	16,27	16,274	16,274	100,00 %	16,27%	16,27	99,94%
2.11.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Luas RTH Publik yang terkelola	420,34 ha	410,17	420,34	420,36	100,00 %	420,34 ha	830,53	48,99%
2.11.04.2.01.007	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	58 unit	13	14	14	100,00 %	18 unit	27	46,55%
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	100%	100	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisa si Renja PD	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra
	BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	penyimpanan limbah B3 sementara yang taat peraturan								
2.11.05.2.02	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan	225 usaha/kegiatan	36	45	45	100,00 %	50 usaha/kegiatan	131	58,22%
2.11.05.2.02.002	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	4 dokumen	1	1	1	100,00 %	1 dokumen	3	75,00%
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	65%	64	65	65	100,00 %	65%	65	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.11.06.2.01	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	60 usaha	58	60	64	106,67 %	60 usaha	60	100,00 %
2.11.06.2.01.001	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	48 dokumen	12	12	12	100,00 %	12 dokumen	36	75,00%
2.11.06.2.01.005	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	180 badan usaha	20	60	94	156,67 %	60 badan usaha	174	96,67%
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100%	100	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.08.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	21 kelompok	21	21	21	100,00 %	21 kelompok	21	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisa si Renja PD	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra
	Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
2.11.08.2.01.0 002	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	12 dokumen	3	2	2	100,00 %	3 dokumen	8	66,67%
2.11.08.2.01.0 005	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelo mpok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/keompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	42 lembaga	14	14	14	100,00 %	14 lembaga	42	100,00 %
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelurahan berseri	57,14%	48	50,79	82,54	162,51 %	53,97%	53,97	94,45%
		Persentase sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (adiwiyata)	30,58%	24	26,21	54,62	208,39 %	24%	24	78,48%
		Jumlah Predikat pengelolaan lingkungan hidup (adipura)	1 kali	1	1	1	100,00 %	1 kali	1	100,00 %
2.11.09.2.01	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh	21 predikat	21	18	52	288,89 %	20 predikat	20	95,24%
		Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh	71 predikat	53	61	71	116,39 %	66 predikat	66	92,96%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.11.09.2.01.001	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	20 entitas	5	5	5	100,00 %	5 entitas	15	75,00%
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.10.2.01	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	2 kasus/ aduan	2	1	1	100,00 %	1 kasus/ aduan	1	50,00%
2.11.10.2.01.004	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	6 pengaduan	1	1	1	100,00 %	1 pengaduan	3	50,00%
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah tertangani	83,18%	83,10	83,15	81,92	98,52%	83,16%	83,16	99,98%
		Persentase sampah yang dikelola berbasis 3R	14,82%	11,00	12,85	16,09	125,21 %	14,84%	14,84	100,13 %
2.11.11.2.01	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Volume sampah tertangani	23.109,62 ton	23382	22808,21	23153,78	101,52 %	22.950,27 ton	22950,27	99,31%
		Volume sampah yang berkurang	4.542,92 ton	3720,74	3680,54	4547,53	123,56 %	3.977,45 ton	3977,45	87,55%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
2.11.11.2.01.004	Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	12 kelompok	3	3	3	100,00 %	3 kelompok	9	75,00%
2.11.11.2.01.007	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	44 unit	11	11	11	100,00 %	23 unit	45	102,27 %
2.11.11.2.01.008	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	4 dokumen	1				1 dokumen	2	50,00%
2.11.11.2.01.016	Sub kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 persentase	97,78	90	90	100,00 %	90 persentase	90	100,00 %
	Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	89 (A)	85,05 (A)	87,00 (A)	85,21 (A)	97,94%	85,21 (A)	85,21 (A)	95,74%
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,5 indeks	89,89	79,5	85,36	107,37 %	80 nilai	80	99,38%
2.11.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	1	100	100,00 %	100%	100	100,00 %

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisa si Renja PD	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra
2.11.01.2.01.001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38 dokumen	5	5	5	100,00 %	11 dokumen	21	55,26%
2.11.01.2.01.006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 laporan	2	2	2	100,00 %	7 laporan	11	47,83%
2.11.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	99,90	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.01.2.02.001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 orang/bulan	48	57	48	84,21%	57 orang/bulan	153	67,11%
2.11.01.2.02.007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16 laporan	4	4	4	100,00 %	4 laporan	12	75,00%
2.11.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	92.00	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	12 paket	4	3	3	100,00 %	3 paket	10	83,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	Kelengkapannya	Kelengkapan								
2.11.01.2.05.0010	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	276 orang	69	69	69	100,00 %	69 orang	207	75,00%
2.11.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	1	1	1	100,00 %	1 paket	3	75,00%
2.11.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	6	5	5	100,00 %	4 paket	15	62,50%
2.11.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 paket	4	2	2	100,00 %	2 paket	8	50,00%
2.11.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	86 paket	32	25	40	160,00 %	22 paket	94	109,30 %
2.11.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	1	1	1	100,00 %	2 paket	4	100,00 %
2.11.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 dokumen	36	36	36	100,00 %	36 dokumen	108	75,00%
2.11.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	200 laporan	72	60	60	100,00 %	50 laporan	182	91,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra
	koordinasi dan konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
2.11.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%					100%	100	100,00 %
2.11.01.2.07.006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 unit					4 unit	4	14,29%
2.11.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.01.2.08.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	144 laporan	36	24	24	100,00 %	24 laporan	84	58,33%
2.11.01.2.08.004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	104 laporan	26	26	26	100,00 %	26 laporan	78	75,00%
2.11.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100	100	100	100,00 %	100%	100	100,00 %
2.11.01.2.09.002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	156 unit	39	39	37	94,87%	39 unit	115	73,72%
2.11.01.2.09.006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	410 unit	78	80	80	100,00 %	72 unit	230	56,10%
2.11.01.2.09.0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/	Jumlah Sarana dan	1700 unit	425	98	98	100,00	102 unit	625	36,76%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2025	
					Target Renja PD tahun	Realisa si Renja PD	Tingka t Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/ Sasaran/ Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d tahun 2025	Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra
011	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					%			

Atas hasil evaluasi kinerja Renja s/d Tahun 2025, terdapat 4 indikator kinerja dari tujuan dan sasaran yang tidak memenuhi target, yaitu :

- Indeks Kualitas Air
 - Permasalahan/Kendala yang dihadapi :
Masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.
 - Dari permasalahan di atas, DLH perlu menentukan strategi dan kebijakan untuk memperbaiki capaian kinerja selanjutnya.
Strategi DLH dalam memperbaiki IKA selanjutnya adalah:
 1. Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
 2. Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.
- Indeks Kualitas Lahan
 - Permasalahan/Kendala yang dihadapi :
 1. Perubahan metode penilaian IKL (metode delineasi)
 2. Meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana kota sejalan dengan alih fungsi lahan, menyebabkan berkurangnya tutupan lahan di Kota Blitar.
 - Dari permasalahan di atas, DLH perlu menentukan strategi dan kebijakan untuk memperbaiki capaian kinerja selanjutnya.
Strategi DLH dalam memperbaiki IKL selanjutnya adalah:
 1. Perhitungan IKL menggunakan citra satelit, diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar
- Persentase badan air yang memenuhi baku mutu
 - Permasalahan/Kendala yang dihadapi :
Masih adanya pencemaran dari industri, ternak, dan dari sektor domestik yang menyebabkan penurunan kualitas air sungai.
 - Dari permasalahan di atas, DLH perlu menentukan strategi dan kebijakan untuk memperbaiki capaian kinerja selanjutnya.
Strategi DLH selanjutnya adalah:
 1. Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.
 2. Berkoordinasi dengan DPUPR sebagai OPD yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik.
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - Kendala yang Dihadapi :

Berdasarkan rekomendasi dari evaluasi SAKIP DLH 2024, ditemukan berbagai kendala pada dokumen berikut ini :

- Target yang ditetapkan tidak menantang karena belum memperhatikan capaian periode sebelumnya.
 - Crosscutting yang dihasilkan belum terintegrasi dengan SOP.
 - Belum terdapat tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan dari hasil monitoring target jangka menengah.
 - Hasil reviu dokumen Renstra belum menunjukkan upaya perbaikan yang memuat inovasi program/kegiatan yang direncanakan.
 - Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya lengkap.
 - Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi, strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja.
 - Belum seluruh unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
 - Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai.
 - Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja..
- Menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi SAKIP DLH 2024, sebagai berikut :
 - Menyesuaikan target kinerja pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan memperhatikan capaian tahun sebelumnya.
 - Menyusup SOP yang mengintegrasikan crosscutting di dalamnya.
 - Menyusun tindak lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah.
 - Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun.
 - Memastikan data pembentuk indikator kinerja sudah terdokumentasi dengan baik dalam proses pengukuran kinerja.
 - Menyusun Rancangan LKjIP yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar telah menetapkan 1 (satu) Kinerja Utama dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), serta 2 (dua) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Sasaran Strategis beserta targetnya untuk dicapai pada Tahun

2024. Capaian Kinerja Utama dan Sasaran Strategis selama Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. 1. Kinerja Utama 1 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Indikator :

1. Indeks kualitas air

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kualitas Air adalah 56,11 atau sebesar 82,78% dari target 67,78. Perhitungan Indeks Kualitas Air diambil dari hasil uji badan air yang dilakukan di 18 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan. Dari total 2 kali pemantauan tersebut, didapatkan data bahwa 14 titik memenuhi baku mutu, 19 titik mengalami cemar ringan, 3 titik mengalami cemar sedang, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemar berat. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dengan melaksanakan uji kualitas air secara rutin, dan berupaya melaksanakan pembinaan yang rutin dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah.

2. Indeks kualitas udara

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kualitas Udara adalah 89,79 atau sebesar 103,89% dari target 86,43. Perhitungan Indeks Kualitas Udara diambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Kualitas Udara. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melaksanakan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster.

2. Indeks kualitas lahan

Pada tahun 2024, realisasi Indeks Kualitas Lahan adalah 34,13 atau sebesar 60,70% dari target 56,23. Indeks kualitas lahan merupakan perhitungan dari luas tutupan vegetasi di RTH publik dan RTH privat. RTH publik adalah RTH yang dikelola pemerintah dan dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Sedangkan RTH privat adalah RTH yang dikelola sendiri oleh masyarakat atau instansi bisa berupa lahan pekarangan, taman lingkungan pemukiman, taman kantor dan taman gedung komersial. Penilaian kualitas lahan dilakukan dengan mendeleniasi pohon yang bersifat keras. Dari hasil deleniaasi yang telah dilakukan secara mandiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar dan telah divalidasi oleh KLHK, terdapat 80,5736410848 ha luas RTH, 587,91480888 ha tutupan vegetasi relevan lainnya, dan 0,618861853 ha rehabilitasi hutan dan lahan yang dinilai. Saat ini alih fungsi lahan menyebabkan

berkurangnya pohon keras sehingga mempengaruhi nilai dari Indeks Kualitas Lahan. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pembangunan dan pemeliharaan RTH Publik.

2. Persentase capaian layanan persampahan

Pada tahun 2024, realisasi persentase capaian layanan persampahan adalah 98,01% atau sebesar 100,24% dari target 97,78%. Peningkatan jumlah penduduk diikuti peningkatan jumlah volume sampah yang cukup pesat, hal ini mengakibatkan daya tampung TPA semakin berkurang. Seiring dengan hal tersebut pemerintah memberikan target bahwa tren pengolahan sampah adalah pengurangan volume sampah yang terolah di TPA dan peningkatan volume sampah yang terolah di masyarakat / dari sumbernya. Berikut adalah penanganan sampah dari berbagai aspek

- 1. Pengolahan sampah di TPA = 20.168,81 ton/tahun
- 2. TPST 3R dan pengomposan = 2.984,97 ton/tahun
- 3. Bank Sampah dan daur ulang sampah = 4.547,53 ton/tahun

Adapun perkiraan total timbulan sampah pada tahun 2024 sejumlah 28.263,775 ton/tahun yang diperoleh dari 3 kecamatan di Kota Blitar. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pembinaan para pelaku pengelola sampah (Bank Sampah, pemilah, dan pengirit sampah); dan pengelolaan sampah secara sanitary landfill.

2. Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya lingkungan bersih dan hijau

Indikator :

1. Persentase badan air yang memenuhi baku mutu

Pada tahun 2024, realisasi persentase badan air yang memenuhi baku mutu adalah 27,22% atau sebesar 32,02% dari target 85,00%. Berdasarkan hasil uji badan air yang dilakukan di 18 titik lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan, didapatkan data bahwa 14 titik memenuhi baku mutu, 19 titik mengalami cemaran ringan, 3 titik mengalami cemaran sedang, dan tidak terdapat titik sampling yang mengalami cemaran berat. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator ini adalah dengan melaksanakan uji kualitas air secara rutin, dan berupaya melaksanakan pembinaan yang rutin dilakukan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan penghasil air limbah.

2. Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)

Pada tahun 2024, realisasi Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi) adalah 100,00% atau sebesar 100,00% dari target 100,00%. Perhitungan Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara diambil dari hasil uji kualitas udara ambien di 4 lokasi dengan frekuensi 2 kali pemantauan yang meliputi sektor perkantoran, industri, perumahan dan transportasi. Dari 4 lokasi tersebut, semua titik lokasi memenuhi baku mutu udara ambien. Selanjutnya hasil uji dimasukkan ke dalam kalkulator perhitungan Indeks Kualitas Udara. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melaksanakan gerakan reboisasi dan penanaman pohon secara klaster.

3. Persentase RTH yang terkelola

Pada tahun 2024, realisasi persentase RTH yang terkelola adalah 100% atau sebesar 100%, dari target 100%. Seluruh RTH publik di Kota Blitar dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana serta tanaman di RTH.

4. Persentase sampah terkelola

Pada tahun 2024, realisasi capaian layanan persampahan perkotaan adalah 98,01% atau sebesar 100,24% dari target 97,78%. Persentase sampah yang tertangani pada tahun 2024 adalah 81,92%, sedangkan persentase sampah yang berkurang pada tahun 2024 adalah 16,09%. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah pembinaan para pelaku pengelola sampah (Bank Sampah, pemilah, dan pengirit sampah); dan pengelolaan sampah secara sanitary landfill.

4. Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik

Pada tahun 2024, realisasi persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik adalah 75,01% atau sebesar 100,01% dari target 75,00%. Berdasarkan laporan pemantauan Limbah B3 pada 42 lokasi usaha penghasil limbah B3 di Kota Blitar, terdapat 31,505 usaha yang taat, dan 10,495 usaha yang tidak taat. Faktor pendorong tercapainya indikator ini adalah dengan melakukan pembinaan dan pemantauan yang dilakukan secara rutin kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3.

3. Kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Indikator :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Pada tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar memperoleh predikat A untuk penilaian SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai 85,21, dari target nilai 87. Sehingga diperoleh nilai SAKIP DLH 2024 tercapai sebesar 97,94%. Faktor pendorong dalam pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah ini adalah dukungan dari semua bidang dalam pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi internal yang memenuhi standar sesuai dengan pertauran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Kota Blitar

No	Indikator	IKU/ IKK/SP M	Target				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		68,86	70,03	71,20	72,37	64,15	67,58	64,94	64,94	67,09	67,17	- Tidak tercapai
	TUJUAN												
1	Indeks kualitas air	IKU	59,92	61,72	63,52	65,32	59,73	67,78	56,11	56,11	69,57	69,67	- Tidak tercapai
2	Indeks kualitas udara	IKU	84,53	85,48	86,43	87,38	85,9	85,83	89,79	89,79	79,69	79,79	- Tercapai
3	Indeks kualitas lahan	IKU	55,23	55,73	56,23	56,73	31,5	33,51	34,13	34,13	39,55	39,56	- Tidak tercapai
4	Persentase capaian layanan persampahan	IKU	93	94	95	96	97,73	97,78	98,01	98,01	98,14	98,24	- Tercapai
5	Persentase ketaatan pelaku usaha penghasil limbah B3		67	72	72	75	60	73,81	75,01	75,01	-	-	- Tercapai - Pada tahun 2026-2027 tidak menjadi indikator
6	Nilai SAKIP Perangkat		85 (A)	86 (A)	87 (A)	88 (A)	84,68 (A)	85,05 (A)	85,21 (A)	85,21 (A)	-	-	- Tercapai - Pada tahun 2026-2027

No	Indikator	IKU/ IKK/SP M	Target				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
	Daerah												tidak menjadi indikator
	SASARAN												
1	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu		-	82,5	85	85	-	91,67%	27,22%	27,22%	-	-	- Tidak tercapai - Pada tahun 2026-2027 tidak menjadi indikator
2	Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara (kawasan industri, pemukiman, perkantoran, dan transportasi)		-	100	100	100	-	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	- Tercapai - Pada tahun 2026-2027 tidak menjadi indikator
3	Persentase RTH yang dikelola		96,10	100	100	100	96,10	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	- Tercapai - Pada tahun 2026-2027 tidak menjadi indikator
4	Persentase sampah dikelola		-	94,99	96	98	-	97,78%	98,01%	98,01%	-	-	- Tercapai - Pada tahun 2026-2027 tidak menjadi indikator

No	Indikator	IKU/ IKK/SP M	Target				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
5	Persentase usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang terkelola dengan baik		-	72,5	75	75	-	73,81%	75,01%	75,01%	-	-	- Tercapai - Pada tahun 2026-2027 tidak menjadi indikator
6	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		85 (A)	86 (A)	87 (A)	88 (A)	84,68 (A)	85,05 (A)	85,21 (A)	85,21 (A)	-	-	- Tercapai - Pada tahun 2026-2027 tidak menjadi indikator

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Lingkungan Hidup

a. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Potensi lahan untuk ruang terbuka hijau mulai menurun seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- ✓ Penambahan penduduk disertai dengan penambahan sarana prasarana pemenuhan kebutuhan penduduk turut berperan penting dalam kenaikan nilai emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
- ✓ Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah sampah dari sumbernya sebagai upaya pengurangan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, sehingga TPA cepat penuh.
- ✓ Ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup relatif masih rendah.

Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Kurangnya dukungan Aparatur yang mempunyai standart kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas – tugas teknis.
- ✓ Proses pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup masih belum berjalan dengan optimal

b. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Potensi penurunan kualitas lingkungan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perkotaan ;
- ✓ Penegakan hukum terhadap aturan lingkungan masih belum optimal ;
- ✓ Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan belum optimal ;

Adapun peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

- ✓ Kerusakan lingkungan telah menjadi isu nasional yang global dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat ;
- ✓ Terjalannya networking yang kondusif antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Blitar;
- ✓ Masyarakat Kota Blitar yang semakin "kritis" untuk mengikuti perkembangan pembangunan Kota Blitar;
- ✓ Lingkungan masyarakat Kota Blitar yang semakin kondusif;
- ✓ Terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu strategis yang melingkupinya. Isu strategis yang dimaksud adalah :

1. Penurunan sumber air permukaan

Dampak perubahan iklim global sudah sangat terasa di Kota Blitar dengan indikasi dari menurunnya sumber air permukaan yang ditengarai dari sumur warga yang tidak lagi dapat diambil dengan pompa air. Agar tidak terjadi perluasan dampak, maka perlu diterapkan kebijakan peduli lingkungan yang benar benar serius dengan melibatkan semua lapisan Masyarakat. Pembuatan lubang lubang biopori pada setiap tanah pekarangan dan tanah terbuka meskipun kapasitas tidak optimal tapi bisa membantu menambah Cadangan air tanah. Pembuatan sumur sumur resapan untuk menampung air hujan agar tidak langsung terbangun ke Sungai akan sangat berpengaruh pada penambahan Cadangan air tanah.

2. Nilai IKLH yang belum mencapai target

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Blitar Tahun 2023 tercapai 67,58 dan termasuk ke dalam kategori SEDANG. Peringkat IKLH Kota Blitar secara nasional yaitu peringkat ke 252 dari 514 kabupaten/kota dan peringkat 12 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Meski masih dalam kategori sedang, nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh ketaatan sektor industri, ternak dan sektor domestik serta upaya pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Sedangkan untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) perlu dilakukan pengendalian terhadap faktor penghambat terwujudnya peningkatan IKL dengan menempuh langkah-langkah strategis antara lain melakukan penanaman pohon yang memiliki tajuk lebar di wilayah Kota Blitar.

3. Kondisi pengelolaan sampah yang belum optimal

Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Blitar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Blitar. Data tersebut mencerminkan masalah yang berkaitan dengan manajemen sampah di wilayah perkotaan, yang umumnya dihadapi oleh banyak kota di Indonesia. Perkiraan jumlah timbulan sampah per hari di Kota Blitar menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kota Blitar. Data tersebut mencerminkan masalah yang berkaitan dengan manajemen sampah di wilayah perkotaan, yang umumnya dihadapi oleh banyak kota di Indonesia.

Perlu adanya perhatian lebih dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan, termasuk upaya untuk mengurangi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, dan memperkuat sistem pengelolaan sampah yang efisien dan ramah lingkungan. Salah satu strategi untuk mengurangi timbulan sampah adalah pemilahan dari hulu sebelum TPS. Strategi ini ditempuh dengan

cara membangun kesadaran masyarakat untuk membentuk Bank Sampah yang bertugas mengumpulkan sampah anorganik seperti plastik dan kertas yang memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan. Semakin banyaknya bank sampah yang aktif dapat mengurangi jumlah volume sampah yang terbuang ke TPA.

4. Adanya limbah domestik industri tahu

Salah satu permasalahan terkait isu limbah yang masih menjadi perhatian dari berbagai tingkat kepentingan baik dari Provinsi Jawa Timur maupun Kota Blitar dan sekitarnya yaitu terkait limbah domestik industri tahu. Permasalahan limbah tahu diduga berasal dari aktivitas industri tahu yang mencemari Kali Tempur di dua desa di Kecamatan Sanankulon. Pada tahun 2022 Kelurahan Pakunden Kota Blitar memiliki kurang lebih 11 industri tahu yang berskala menengah – keatas. Industri tahu tersebut menghasilkan limbah organik berupa limbah cair hasil produksi tahu yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan dapat mengganggu masyarakat Kelurahan Pakunden. Limbah cair tahu mengandung zat berbahaya seperti BOD, dan TSS, serta mengandung unsur hara yang baik bagi tanaman yaitu P, N, K, Mg, Ca, dan Fe.

Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar yaitu dengan pengadaan berupa pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Saat ini di Kota Blitar sudah tersedia sebanyak 74 unit IPAL domestik komunal. Pada Tahun 2021 telah dilakukan pembangunan 1 unit IPAL domestik komunal di Kelurahan Gedog dan 1 unit tangki septik Sumber Sehat di Kelurahan Karangtengah. Pemerintah Kota Blitar melalui dinas lingkungan hidup (DLH) juga sudah berkali-kali melayangkan surat teguran kepada pelaku industri tahu untuk mengelola limbah secara benar. DLH juga telah memberikan pembinaan terhadap pelaku-pelaku industri tahu. Pembinaan itu berupa bimbingan teknis pengelolaan air limbah pabrik yang benar. Namun masih banyak industri yang tidak taat terhadap pengelolaan lingkungan.

Terkait dengan isu strategis di atas, hal – hal yang perlu ditindaklanjuti dalam program dan kegiatan prioritas Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan aksi mitigasi Rencana Aksi Daerah untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca
2. Melaksanakan penghijauan di area publik
3. Sosialisasi dan pembinaan kepada usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi sebagai pencemar
4. Melaksanakan kampung zero waste

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
Kota Blitar

Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	6.632.694.32 2,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	100	6.632.720.99 1,00	Perubahan indikator program
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	1.500.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 Persen	7.000.000,00	Penyesuaian pagu anggaran
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokume n	1.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokume n	500.000,00	Penyesuaian belanja, geser ke subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	500.000,00	Tetap

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			SKPD								
						Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	500.000,00	Penambahan subkegiatan sesuai pemetaan AU
						Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2.500.000,00	Penambahan subkegiatan sesuai pemetaan AU
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	11 Dokumen	500.000,00	Pemecahan sub kegiatan dari sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis	1 Berita Acara	2.500.000,00	Penambahan subkegiatan sesuai pemetaan AU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
								Pembangunan			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	5.929.982.465,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	5.929.982.465,00	Tetap
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	5.929.482.465,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	5.929.482.465,00	Tetap
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	500.000,00	Tetap
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar	100 Persen	500.000,00	Penambahan subkegiatan sesuai pemetaan AU
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	500.000,00	Penambahan subkegiatan sesuai pemetaan AU

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
							a				
						Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	500.000,00	Penambahan subkegiatan sesuai pemetaan AU
						Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	500.000,00	Penambahan subkegiatan sesuai pemetaan AU
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	41.776.600,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 Persen	41.776.600,00	Tetap
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	41.776.600,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	69 Orang	41.776.600,00	Tetap
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	199.955.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 Persen	192.762.426,00	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.496.400,00	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		a					a				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	28.790.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	28.789.600,00	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	3.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2.998.100,00	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	66.550.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	60.050.000,00	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.000.200,00	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.320.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen	4.710.000,00	Penyesuaian standar harga
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	86.795.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50 Laporan	85.718.126,00	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa	SKPD			
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	<i>100 Persen</i>	<i>345.055.357,00</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>	<i>100 Persen</i>	<i>345.886.900,00</i>	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	62.031.357,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	62.032.500,00	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	283.024.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	26 Laporan	283.854.400,00	Penyesuaian standar harga
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan</i>	<i>100 Persen</i>	<i>114.424.500,00</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan</i>	<i>100 Persen</i>	<i>114.312.600,00</i>	Penyesuaian standar harga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	80.617.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	80.505.100,00	Penyesuaian standar harga
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	33.807.500,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	33.807.500,00	Tetap

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		a					a				
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 unit	0,00						Penghapusan sub kegiatan, karena pagu anggaran 0
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	55	5.500.000,00	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	55	5.500.000,00	Tetap
	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>5.500.000,00</i>	<i>Tetap</i>
	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	5.500.000,00	Penyusunan RPPLH Kabupaten/ Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	5.500.000,00	Tetap
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	69.57 79.69	228.605.000,00	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara	69.57 79.69	228.599.900,00	Penyesuaian standar harga
	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah titik sampling udara</i>	<i>18 Titik 3 Aksi 3 Kali</i>	<i>228.605.000,00</i>	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku</i>	<i>18 Titik 3 Aksi 3 Kali</i>	<i>228.599.900,00</i>	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			<i>mutu Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim</i>					<i>mutu Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim</i>			
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	157.610.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	157.600.000,00	Penyesuaian standar harga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	70.995.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	70.999.900,00	Penyesuaian standar harga
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	Persentase RTH	16.26	7.270.631.300,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	Persentase RTH	16.26	7.270.631.300,00	Tetap
	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i>		<i>Luas RTH Publik yang Terkelola</i>	<i>420,36 ha</i>	<i>7.270.631.300,00</i>	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i>		<i>Luas RTH Publik yang Terkelola</i>	<i>420,36 ha</i>	<i>7.270.631.300,00</i>	<i>Tetap</i>
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	18 Unit	7.270.631.300,00	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	18 Unit	7.270.631.300,00	Tetap

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	76.47	2.972.275,00	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	76.47	2.970.000,00	Penyesuaian standar harga
	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan</i>	<i>45 Usaha</i>	<i>2.972.275,00</i>	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah usaha dan/ atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan</i>	<i>45 Usaha</i>	<i>2.970.000,00</i>	Penyesuaian standar harga
	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	50 Usaha	2.972.275,00	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	50 Usaha	2.970.000,00	Penyesuaian standar harga
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	Persentase pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup	67	5.235.734,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	67	5.250.000,00	Penyesuaian standar harga
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup</i>	<i>68,5 Usaha</i>	<i>5.235.734,00</i>	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup</i>	<i>68,5 Usaha</i>	<i>5.250.000,00</i>	<i>Penyesuaian standar harga</i>
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan	12 Dokumen	2.920.000,00	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan,	12 Dokumen	2.900.000,00	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
		a	Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				a	dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	2.315.734,00	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	2.350.000,00	Penyesuaian standar harga
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina	100	167.127.385,00	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	100	165.003.200,00	Penyesuaian standar harga
	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina</i>	<i>4 Kelompok</i>	<i>167.127.385,00</i>	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina</i>	<i>4 Kelompok</i>	<i>165.003.200,00</i>	Penyesuaian standar harga
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	39.895.200,00	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3 Dokumen	39.633.400,00	Penyesuaian standar harga

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14 Lembaga	127.232.185,00	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas /kelompok masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	14 Lembaga	125.369.800,00	Penyesuaian standar harga
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	185.026.875,00	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	186.117.500,00	Penyesuaian standar harga
	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh</i>	<i>66 Predikat 56 Predikat</i>	<i>185.026.875,00</i>	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>		<i>Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh</i>	<i>66 Predikat 56 Predikat</i>	<i>186.117.500,00</i>	<i>Penyesuaian standar harga</i>
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	185.026.875,00	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	186.117.500,00	Penyesuaian standar harga
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	500.000,00	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	Persentase Penyelesaian Sengketa/ Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100	1.500.000,00	Penyesuaian pagu anggaran
	<i>Penyelesaian</i>		<i>Jumlah</i>	<i>1</i>	<i>500.000,00</i>	<i>Penyelesaian</i>		<i>Jumlah</i>	<i>1</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>Penyesuaian pagu anggaran</i>

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
	<i>Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>		<i>kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</i>	<i>Kasus/ aduan</i>		<i>Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>		<i>kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</i>	<i>Kasus/ aduan</i>		
	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	500.000,00	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	1 Pengaduan	1.500.000,00	Penyesuaian pagu anggaran
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	61.7	15.262.532.196,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	Persentase cakupan layanan persampahan	61.7	20.491.458.432,00	Tambahan prioritas kota
	<i>Pengelolaan Sampah</i>		<i>Persentase sampah berkurang Persentase sampah tertangani</i>	<i>16,33 Persen 81,81 Persen</i>	<i>15.262.532.196,00</i>	<i>Pengelolaan Sampah</i>		<i>Persentase sampah berkurang Persentase sampah tertangani</i>	<i>16,33 Persen 81,81 Persen</i>	<i>20.491.458.432,00</i>	<i>Tambahan prioritas kota</i>
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	347.453.663,00	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	3 Kelompok	347.453.663,00	Tetap
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	20 Unit	8.271.540.364,00	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	20 Unit	13.500.466.600,00	Tambahan prioritas kota (Pengadaan incinerator sampah)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
			Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir					Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir			
	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 Persentase	6.643.538.169,00	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	90 Persentase	6.643.538.169,00	Tetap
					29.760.825.087,00					34.989.751.323,00	

Berdasarkan penyandingan terhadap rancangan RKPD dengan pagu Rp 29.760.825.087 Dan analisis kebutuhan dgn pagu 34.989.751.323 Terdapat penambahan Rp 5.228.926.236 dengan perubahan sebagai berikut : Penambahan sub kegiatan baru sesuai pemetaan, penyesuaian standar harga, perubahan indikator program penunjang, dan tambahan prioritas kota.

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

Pada Tahun 2026 ini tidak terdapat usulan masyarakat untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD maupun melalui Proposal Permohonan Bantuan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Blitar

No	Usulan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
		NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DLH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045 perlu sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, prioritas daerah harus mendukung prioritas nasional. Prioritas nasional merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden, dimana Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program hasil Terbaik Cepat (PHTC). Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1:
Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2:
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3:
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4:
Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5:
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6:
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Prioritas Nasional 7:

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Prioritas Nasional 8:

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD tahun 2026 perlu mengacu pada Tema RKP Tahun 2026. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2026 “Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif”. Untuk mewujudkan tema RKP tersebut ditetapkan sasaran makro pembangunan nasional pada tahun 2026, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi;
2. PDRB per kapita (juta);
3. Kontribusi PDRB Provinsi;
4. Tingkat Kemiskinan;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
6. Indeks Rasio Gini;
7. Indeks Modal Manusia;
8. Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK, dan
9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Selanjutnya, untuk urusan Lingkungan Hidup, arah kebijakan yang diambil yaitu Penguatan Lingkungan Hidup yang berkualitas, dengan asta cita Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; dan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan asta cita, program dan sub kegiatan yang diambil, yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan sub kegiatan :
 - Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan
2. Program Pengelolaan Persampahan, dengan sub kegiatan :
 - Penanganan sampah melalui pengangkutan
 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2026-2027

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target	
						2023	2024	2025	2026	2027
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dan Berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan (untuk level wilayah Kabupaten/Kota).	IKLH Kabupaten/Kota = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	67,58	64,94	64,94	67,09	67,17
2		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan	$IKA = \sum_{i=1}^n W_i I_i$ Keterangan: W_i = Bobot parameter i I_i = Nilai dari parameter i	67,78	56,11	56,11	69,57	69,67

				kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.						
3		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.	 $IKU = 100 \cdot \left(\frac{34}{0.99} (F_{SO_2} + 0.81) \right)$ $I_{SO_2} = \frac{Data - rata\ SO_2}{Rata\ Maks\ SO_2}$ $I_{SO_2} = \frac{Data - rata\ SO_2}{Rata\ Maks\ SO_2}$ $I_{SO_2} = \frac{Data - rata\ SO_2}{Rata\ Maks\ SO_2}$ $I_{SO_2} = \frac{Data - rata\ SO_2}{Rata\ Maks\ SO_2}$	85,83	89,79	89,79	79,69	79,79
4		Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas	IKL = IKTL + Faktor koreksi gambut	33,51	34,13	34,13	39,55	39,56

				ekosistem gambut.						
5		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah Kota	Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (kalkulator)	NA	61,70	61,70	61,7	61,7
6		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penunjang Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Perangkat Daerah sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 atau aturan lain yang berlaku pada aplikasi e-Sukma	IKM = Jumlah NRR IKM Tertimbang x 25 NRR IKM Tertimbang = $\frac{\text{NRR per unsur} \times (0,111)}{\text{Jumlah nilai persepsi per unsur dibagi jumlah responden}}$ NRR = Nilai rata-rata	89,89	85,36	85,36	85	85,5

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rencana dan pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dalam konteks kesehatan, strategi diartikan sebagai rencana tindakan yang digunakan untuk mencapai tujuan kesehatan, dalam hal ini tujuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar adalah “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”, sedangkan arah kebijakan adalah pedoman yang digunakan untuk mengarahkan kebijakan kesehatan. Strategi dan arah kebijakan yang efektif dapat membantu dalam proses pencapaian tujuan yang lebih baik. Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar berdasarkan Renstra 2025-2029 dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar

Visi : Kota Blitar yang Maju, Sehat dan Sejahtera Menuju Kota Masa Depan				
Misi : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis Smart Governance;				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Air	Peningkatan Baku Mutu Badan air	• Pembinaan pengelolaan air limbah bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan • Pelaksanaan uji kualitas air badan air • Penyediaan Data dan Informasi kualitas Air • Penyusunan Kebijakan Dokumen Pencegahan dan penanggulangan Pencemaran	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Pemulihan Sumber Pencemar	• Pelaksanaan penghentian pencemaran air • Pelaksanaan Pembersihan Pencemaran	
	Meningkatnya Kualitas Udara	Peningkatan Baku mutu udara	• Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim • Pelaksanaan uji kualitas udara • Penyediaan dokumen hasil inventarisasi GRK	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

			dan Profil GRK • Pelaksanaan Upaya Mitigasi Perubahan Iklim	
	Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Peningkatan Ketersediaan Ruang terbuka hijau	• Pemeliharaan dan Penataan Taman Kota • Penyediaan Sarpras Taman Kota • Penyediaan Dokumen Rencana Induk RTH • Pelaksanaan Sosialisasi Penghijauan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola persampahan dan Penanganan Limbah B3	• Penyediaan dan pemeliharaan sarpras persampahan • Pelayanan pembersihan sampah • Pembinaan pelaku Pengelolaan Sampah (Bank sampah, Pemilah dan pengirit sampah) • Penanganan dan pengolahan sampah • Penyusunan kebijakan pengelolaan sampah • pembinaan dan pemantauan bagi pemilik usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 • Penyediaan data	a. Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) c. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) d. Program Penghargaan Lingkungan Hidup

			pengelolaan limbah B3 • Penyusunan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup • Pelaksanaan Monev Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup • Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/ usaha kegiatan • Pelaporan pelaku usaha dan/ usaha kegiatan • Pengelolaan Pengaduan Lingkungan Hidup • Penilaian Kinerja Lingkungan Hidup • Peningkatan kompetensi bagi SDM Lingkungan Hidup • Pembinaan kelompok peduli lingkungan	untuk Masyarakat e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup f. Program Pengelolaan Persampahan
	Meningkatnya kualitas pelayanan penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang Perangkat daerah sesuai dengan standard pelayanan	• Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

			Perangkat Daerah • Pemenuhan pelayanan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku • Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan sesuai dengan kebutuhan	
--	--	--	---	--

3.4 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan, dalam hal ini adalah urusan dibidang kesehatan. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, indikator yang dijadikan IKK berjumlah 3 (tiga) indikator. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2026-2027 dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2026-2027

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan (untuk level wilayah Kabupaten/Kota).	$IKLH \text{ Kabupaten/Kota} = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	67,58	64,94	64,94	67,09	67,17

No	IKK	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Realisasi			Target	
				2023	2024	2025	2026	2027
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas pengelolaan sampah di suatu wilayah Kota	Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (kalkulator)	NA	61,70	61,70	67,09	67,17
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Mengukur tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	67,5	65	65	67	68

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

Pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2026 selain melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, rumusan program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertibangkan beebberapa hal, yaitu :

- 1. Mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu misi ke 3 : Mewujudkan Pembangunan Kota Blitar yang Berkelanjutan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berbasis *Smart Governance*.
- 2. Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025;
- 3. Hasil evaluasi kinerja pada tahun sebelumnya;
- 4. Tindaklanjut LKjIP Tahun 2024; dan
- 5. Pencapaian program prioritas daerah dan perangkat daerah.

Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar pada Renja Tahun 2025 adalah 10 program 17 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp. 34.989.751.323,00 dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum.

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2026 disajikan sebagai berikut :

Tabel . 3.4
Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan PD Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
2.11	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	
2.11.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	
2.11.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 1.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
			Tupoksi
2.11.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 1.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 1.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 1.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar</i>	
2.11.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 2.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 3	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar</i>	
2.11.01.2.0 3.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 4	<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah</i>	
2.11.01.2.0	Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan	Mendukung

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
4.0007	Daerah	Retribusi Daerah	pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 5.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	
2.11.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	
2.11.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	<i>Pemerintahan Daerah</i>	<i>sesuai kebutuhan</i>	
2.11.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	
<i>2.11.02.2.0 1</i>	<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun</i>	
2.11.02.2.0 1.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Mendukung pencapaian Tupoksi
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu Persentase kawasan yang memenuhi baku mutu udara	
<i>2.11.03.2.0 1</i>	<i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim</i>	
2.11.03.2.0 1.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Prioritas Asta Cita dan pencapaian IKU
2.11.03.2.0 1.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Prioritas Asta Cita dan pencapaian IKU
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	
<i>2.11.04.2.0 1</i>	<i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i>	<i>Luas RTH Publik yang Terkelola</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
2.11.04.2.0 1.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Mendukung pencapaian IKU
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	
2.11.05.2.0 2	<i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan</i>	
2.11.05.2.0 2.0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Mendukung pencapaian IKU
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	
2.11.06.2.0 1	<i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup</i>	
2.11.06.2.0 1.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Mendukung pencapaian IKU
2.11.06.2.0 1.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Mendukung pencapaian IKU
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	
2.11.08.2.0 1	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk</i>	<i>Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina</i>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
	<i>Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>		
2.11.08.2.0 1.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Mendukung pencapaian IKU
2.11.08.2.0 1.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Mendukung pencapaian IKU
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
<i>2.11.09.2.0 1</i>	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah predikat adiwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh</i>	
2.11.09.2.0 1.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Mendukung pencapaian IKU
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	
<i>2.11.10.2.0 1</i>	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</i>	
2.11.10.2.0 1.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Mendukung pencapaian IKU
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan layanan persampahan	
<i>2.11.11.2.0 1</i>	<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>Persentase sampah berkurang Persentase sampah tertangani</i>	
2.11.11.2.0 1.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang	Mendukung pencapaian IKU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan/sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Keterangan
		Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	
2.11.11.2.0 1.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Prioritas Asta Cita dan mendukung pencapaian IKU
2.11.11.2.0 1.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Prioritas Asta Cita dan mendukung pencapaian IKU

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2026 berisi program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah. Penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2026 didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024
pada Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air, perlu dilakukan :		
1	Melakukan pembinaan dan monev terhadap pelaku usaha industri dan peternak yang diindikasikan menyebabkan terjadinya pencemaran air.	Pembinaan terhadap industri dan pemilik hewan ternak yang membuang limbahnya ke sungai dengan membuat IPAL dengan berkoordinasi / bekerjasama dengan DPUPR yang memiliki tupoksi atas pengelolaan limbah domestik, serta melakukan monitoring secara berkelanjutan.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2	Memberikan rekomendasi ke DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen IPAL Domestik.	Dokumen rekomendasi kepada DPUPR sesuai hasil pengujian kualitas efluen limbah domestik	
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara, perlu dilakukan :		
1	Bekerja sama dengan Dishub untuk melaksanakan uji emisi kendaraan secara rutin.	Melakukan penanaman tanaman sesuai kebutuhan	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup / Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
	Untuk meningkatkan nilai Indeks Kualitas Lahan, perlu		

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	dilakukan :		
1	Perhitungan IKL menggunakan citra satelit, diupayakan melaksanakan penanaman tanaman penghijauan menggunakan tanaman yang bertajuk lebar..	Melakukan penanaman tanaman sesuai kebutuhan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) / Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota / Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
	Untuk meningkatkan capaian layanan persampahan, perlu dilakukan :		
1	Optimalisasi pemanfaatan Cell 1 dan penataan lahan yang lebih efektif.	Penataan dan pengolahan sampah di Cell 1 dengan metode <i>sanitary landfill</i>	Program Pengelolaan Persampahan / Kegiatan Pengelolaan Sampah / Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2	Pembentukan kampung Zero Waste.	Pelaksanaan Kampung Zero Waste di Kelurahan Gedog	Program Pengelolaan Persampahan / Kegiatan Pengelolaan Sampah / Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

4.1 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026

Daftar Program dan Kegiatan beserta indikator dan kebutuhan anggaran indikatif Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel. 4.2.

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Blitar

Nama PD : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				34.989.751.323,00				29.767.822.812,00
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				34.989.751.323,00				29.767.822.812,00
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase fasilitasi layanan kedinasan sesuai standar / ketentuan yang berlaku	-	100	6.632.720.991,00	-		100	6.639.694.322,00
<i>2.11.01.2.01</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar</i>		<i>100 Persen</i>	<i>7.000.000,00</i>			<i>100 Persen</i>	<i>7.500.000,00</i>
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		11 Dokumen	1.000.000,00
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7 Laporan	500.000,00
2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	1 Data	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM		1 Data	500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Semua Kel/Desa			(DAU)			
2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	2.500.000,00
2.11.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	500.000,00
2.11.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	2.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Berita Acara	2.500.000,00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar		100 Persen	5.929.982.465,00			100 Persen	5.929.982.465,00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	57 Orang/bulan	5.929.482.465,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		58 Orang/bulan	5.929.482.465,00
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4 Laporan	500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD							
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah sesuai standar		100 Persen	500.000,00			100 Persen	500.000,00
2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 laporan	500.000,00
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Pendapatan Daerah kewenangan Perangkat Daerah		100 Persen	500.000,00			100 Persen	500.000,00
2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	500.000,00
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 Persen	41.776.600,00			100 Persen	41.776.600,00
2.11.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	69 Orang	41.776.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		69 Orang	41.776.600,00
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar		100 Persen	192.762.426,00			100 Persen	199.955.400,00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	1 Paket	2.496.400,00	DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	2.500.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Bangunan Kantor yang Disediakan	Semua Kel/Desa			(DAU)			
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	28.789.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5 Paket	28.790.400,00
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	2.998.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	3.000.000,00
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35 Paket	60.050.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Paket	66.550.000,00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	8.000.200,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2 Paket	8.000.000,00
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Dokumen	4.710.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		36 Dokumen	4.320.000,00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Laporan	85.718.126,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		52 Laporan	86.795.000,00
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar		100 Persen	345.886.900,00			100 Persen	345.055.357,00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kota Blitar, Semua	24 Laporan	62.032.500,00	DANA ALOKASI		24 Laporan	62.031.357,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan, Semua Kel/Desa			UMUM (DAU)			
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Laporan	283.854.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		26 Laporan	283.024.000,00
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai kebutuhan		100 Persen	114.312.600,00			100 Persen	114.424.500,00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	39 Unit	80.505.100,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		39 Unit	80.617.000,00
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Unit	33.807.500,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		72 Unit	33.807.500,00
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	-	55	5.500.000,00	-		58	5.500.000,00
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun		1 Dokumen	5.500.000,00			1 Dokumen	5.500.000,00
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	5.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	5.500.000,00
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu Persentase	-	66,7 100	228.599.900,00	-		77,8 100	228.605.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		kawasan yang memenuhi baku mutu udara							
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik sampling udara ambien yang memenuhi baku mutu Jumlah aksi pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang terlaksana Jumlah kegiatan dampak pengendalian perubahan iklim		18 Titik 3 Aksi 3 Kali	228.599.900,00			18 Titik 3 Aksi 3 Kali	228.605.000,00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	157.600.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	157.610.000,00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	70.999.900,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Dokumen	70.995.000,00
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH	-	16,26	7.270.631.300,00	-		16,26	7.270.631.300,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik yang Terkelola		420,36 ha	7.270.631.300,00			420,36 ha	7.270.631.300,00
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	7.270.631.300,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		18 Unit	7.270.631.300,00
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	-	76,47	2.970.000,00	-		76,47	2.970.000,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	DAN BERACUN (LIMBAH B3)								
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan penghasil limbah B3 yang taat peraturan		45 Usaha	2.970.000,00			45 Usaha	2.970.000,00
2.11.05.2.02.0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Usaha	2.970.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50 Usaha	2.970.000,00
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	-	67	5.250.000,00	-		68	5.235.734,00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha yang taat terhadap peraturan lingkungan hidup		66 Usaha	5.250.000,00			66 Usaha	5.235.734,00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	2.900.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12 Dokumen	2.920.000,00
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Badan Usaha	2.350.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60 Badan Usaha	2.315.734,00
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase kelompok masyarakat peduli	-	75 100	165.003.200,00	-		75 100	167.127.385,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	UNTUK MASYARAKAT	lingkungan yang aktif Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya							
2.11.08.2.01	<i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang dibina</i>		100 Persen	165.003.200,00			100 Persen	167.127.385,00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	39.633.400,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Dokumen	39.895.200,00
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Lembaga	125.369.800,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		14 Lembaga	127.232.185,00
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	100	186.117.500,00	-		100	185.026.875,00
2.11.09.2.01	<i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah predikat adwiyata yang diperoleh Jumlah predikat kelurahan berseri yang diperoleh</i>		66 Predikat 56 Predikat	186.117.500,00			71 Predikat 57 Predikat	185.026.875,00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	Kota Blitar, Semua Kecamatan,	5 Entitas	186.117.500,00	DANA ALOKASI UMUM		5 Entitas	185.026.875,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Semua Kel/Desa			(DAU)			
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	-	100	1.500.000,00	-		100	500.000,00
2.11.10.2.01	<i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kasus/aduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</i>		1 Kasus/aduan	1.500.000,00			1 Kasus/aduan	500.000,00
2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Pengaduan	1.500.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1 Pengaduan	500.000,00
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan layanan persampahan	-	98,14	20.491.458.432,00	-		98,24	15.262.532.196,00
2.11.11.2.01	<i>Pengelolaan Sampah</i>	<i>Persentase sampah berkurang Persentase sampah tertangani</i>		17,16 Persen 80,98 Persen	20.491.458.432,00			17,52 Persen 80,72 Persen	15.262.532.196,00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kelompok	347.453.663,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		3 Kelompok	347.453.663,00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	13.500.466.600,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		21 Unit	8.271.540.364,00

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir							
2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Persentase	6.643.538.169,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		90 Persentase	6.643.538.169,00

BAB V **P E N U T U P**

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai fungsi yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2026. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – kaidah pelaksanaan

- a. Renja tahun 2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Dokumen Perencanaan dan Anggaran (DPA) tahun 2026.
- b. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renja tahun 2026 wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Blitar.
- d. Dalam hal pelaksanaan Renja tahun 2026 terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka akan dilakukan penyesuaian.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja DLH Tahun 2026 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar tahun 2025. Rencana Kerja

(Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh seluruh sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan *good governance*.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BLITAR

Ir. JAJUK INDIHARTATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199303 2 047